



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## CADANGAN APBN 2024 UNTUK PENYELAMATAN BUMN KARYA

**Lisnawati**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[lisnawati@dpr.go.id](mailto:lisnawati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024, pemerintah menetapkan investasi kepada sektor infrastruktur, industri dan lainnya akan dilakukan melalui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun, nilainya diperkirakan mencapai Rp28,59 triliun yang terdiri dari Rp14,4 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur dan Rp14,19 triliun di sektor lainnya. Khusus untuk penyelamatan dan restrukturisasi BUMN karya, pemerintah menyiapkan anggaran cadangan investasi senilai Rp18,59 triliun dalam bentuk PMN. Rencana PMN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan suntikan modal tahun 2023 sebesar Rp45,8 triliun.

PMN tahun 2024 akan diberikan kepada empat BUMN. *Pertama*, PT Utama Karya (HK) sebesar Rp12,5 triliun yang akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol. *Kedua*, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah. *Ketiga*, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp3,55 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. *Keempat*, PT Len Indonesia berupa PMN non-tunai sebesar Rp649 miliar. PMN non-tunai tersebut dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN yang akan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia.

BUMN Karya akan menerima PMN terbesar pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pemberian PMN kepada HK untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi serta mendukung program pemerintah di bidang konektivitas nasional dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait. Ini untuk mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia. HK juga akan melanjutkan penyelesaian penugasan dari pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.812 km.

Sebagaimana diketahui dua BUMN karya dengan eksposur pinjaman terbesar adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PMN sebesar Rp3 triliun untuk Waskita Karya sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Namun, PT Waskita Karya mengalami kekurangan kolektibilitas, modal kerja, dan likuiditas dalam perkembangannya sehingga bermasalah. Komite privatisasi telah memulai proses aksi korporasi yakni hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *right issue*. Hanya saja, kondisi PT Waskita Karya terus memburuk. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai potensi *rights issue* tidak terserap publik cukup besar sehingga tujuan untuk memperoleh modal kerja dari porsi publik tidak tercapai. Akhirnya, kondisi ini tidak dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan secara komprehensif.

Kemenkeu membatalkan pemberian suntikan PMN kepada PT Waskita Karya yang telah dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Keputusan ini diambil karena PMN kepada BUMN tersebut dianggap berisiko. Saat ini, pemerintah memiliki 75,34% kepemilikan di PT Waskita Karya atau setara 21,70 miliar saham. Namun demikian, Kementerian BUMN menyatakan pemerintah nantinya akan mengembalikan PMN Waskita Karya melalui HK. Skema pengembalian PMN akan dilakukan dengan menjadikan Waskita Karya sebagai anak usaha dari HK terlebih dulu melalui inbreng saham milik pemerintah. Mengacu pada laporan keuangan per semester I 2023, Waskita Karya memiliki total utang terbesar di antara BUMN Karya yakni senilai Rp84,31 triliun, naik sebesar 0,31% (*year on year, yoy*).

## Atensi DPR

Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya melalui cadangan PMN pada tahun 2024. Dana untuk penyelamatan BUMN konstruksi akan dialokasikan melalui anggaran infrastruktur. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan pelaksanaan restrukturisasi BUMN Karya agar kinerjanya membaik. Komisi VI DPR RI juga perlu mengawal kinerja BUMN Karya dan rencana anggaran PMN 2024 kepada BUMN Karya. Hal ini dimaksudkan agar investasi yang dilakukan pemerintah tepat guna dan memberikan manfaat atau deviden bagi negara.

## Sumber

katadata.co.id, 18 Agustus 2023;  
Koran Tempo, 15 Agustus 2023;  
snbcindonesia.com, 18 Agustus 2023.

Minggu ke-3 Agustus  
(14 s.d. 20 Agustus 2023)

# 2023



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023